

# RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2024



Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
2024

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kuat, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 telah tersusun dengan baik sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tataran penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dapat tersusun.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan disusun berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu kepada RKPD tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing - masing komponen organisasi dapat berlangsung dalam proses sinergi, integralistik dan koordinasi.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

Anggaran 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Makassar, Juli 2023  
Kepala Dinas

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

**Ir.H.ANDI PARENRENGI,MP**  
NIP. 19631231 199703 1 020

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum .....	3
I.3 Maksud dan Tujuan.....	9
I.4 Sasaran .....	10
I.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	13
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	13
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	35
II.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah .....	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	85
III.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	85
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	93
IV. 1 Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan .....	93
BAB V PENUTUP.....	114
V.1 Kesimpulan.....	114
V.2 Rekomendasi.....	115

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD menjadi penting dalam perencanaan daerah, karena merupakan implementasi perencanaan strategis Perangkat Daerah ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk Tahun Anggaran 2024.

Renja PD adalah instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah dalam realisasi capaian kinerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan strength, opportunity dan constraint yang ada atau yang mungkin timbul.

Penyusunan RKPD dilakukan guna menampung seluruh asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 maupun untuk menampung belanja prioritas dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Renja dan anggaran perangkat daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan Tahun 2022, maka untuk mencapai target sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, maka perlu dilakukan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024. Hal ini guna mensinergikan dan menyesuaikan target dan pagu indikatif program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

## **I.2 Landasan Hukum**

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 275) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 97);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jasa

Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan;

27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan;

28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah penjabaran dari Renstra Tahun 2024–2026, untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dimaksudkan untuk :

1. Mendokumentasikan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang, kendala atau permasalahan yang ada;
2. Menjabarkan dan melaksanakan Tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) organisasi secara efektif dan efisien dalam bingkai organisasi yang senantiasa berubah dan berkembang;

3. Menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Perpustakaan dan kearsipan dan untuk mendukung Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

## **2. Tujuan**

Adapun tujuan Perubahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah :

1. Pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Sarana kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan.
3. Sebagai bahan untuk penyusunan program dan kegiatan selanjutnya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan ke depan.

### **I.4 Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dalam proses penyusunan rencana kerja (Renja) Tahun 2024 adalah :

1. Mereview dan mengkaji terhadap hasil evaluasi Tahun 2023
2. Review terhadap rancangan awal P-RKPD
3. Rencana Kerja meliputi; indikator kinerja, target kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan kebutuhan dana indikatif.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika, yaitu sebagai berikut :

- Bab I   Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan Renstra yang disertai dengan gambaran tentang kerangka ekonomi daerah.
- Bab II   Hasil Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Sulsel Tahun Lalu (n-1), memuat uraian tentang analisis capaian Renja (ulasan tentang target dan capaian indikator kinerja), evaluasi pelaksanaan Renja (capaian pada tahun n-2, n-1 dan n, tahun rencana dikaitkan dengan pencapaian target RENJA dan RPJMD).
- Bab III  Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov.Sulsel, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov.Sulsel tahun n-1 sampai dengan tahun 2023.
- Bab IV  Rencana Kerja dan Pendanaan dalam renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov.Sulsel, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran

yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Bab V Penutup, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian**

##### **Renstra**

Hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Renja tahun 2024. Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dan rencana strategis (Renstra) sebagai dokumen jangka menengah. Kualitas penyusunan renja akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian renstra OPD. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara rinci rekapitulasi evaluasi Renja dan Renstra sampai dengan tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 Terlampir Tabel T-C. 29

**Tabel T-C. 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021- 2023**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

<b>Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (output)/ sub kegiatan ( output )</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program ( Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2024</b>	<b>Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelurahan Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan SubKegiatan Tahun 2022 ( n-2)</b>			<b>Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) n-1</b>		<b>Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan</b>
				<b>Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)</b>	<b>Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>		<b>Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 ( tahun n-1)</b>	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10)/(4)

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik</b>			<b>0.80%</b>	<b>0.80%</b>	<b>100%</b>	<b>0.60%</b>		
	<b>Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah</b>	<b>80 Nilai</b>							
	<b>Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
	<b>Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah</b>	<b>100 Nilai</b>							
	<b>Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
	<b>Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b>							
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	<b>100%</b>		

		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja yang Tersedia Tepat Waktu</b>	<b>10 Dokumen /12 Laporan</b>							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen				
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen				

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan		
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi keuangan pada Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	<b>100%</b>		
	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>	<b>27 Dokumen / 15 Laporan</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	<b>100%</b>		

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan setiap bulannya selama satu tahun			14 Bulan	14 Bulan	100%			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/Bulan					180 Orang/Bulan		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan			1 Laporan	1 Laporan	100%			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen					12 Dokumen		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan pelaksanaan akuntansi			1 Laporan	1 Laporan	100%			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Laporan Prognosis Realisasi Keuangan			1 Laporan	1 Laporan	100%			

Realisasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporna Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan						1 Laporan		
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>2 Dokumen / 6 Laporan</b>					<b>100%</b>		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen		
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>							
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi			150	150	100%			
	Jumlah Dokumen Hasil Kooridinas dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						12 Dokumen		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit							

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Listrik			20 Komponen	20 Komponen	100%			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket					7 Paket		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			20 jenis	20 jenis	100%			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket					20 Paket		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan penggandaan			100.000 Lembar	100.000 Lembar	100%			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan					12 Laporan		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan					12 Laporan		

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi			75 Orang	75 Orang	100%			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan					12 Laporan		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penataan arsip dinamis			10 OPD	10 OPD	100%			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen					5 Dokumen		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengadaan barang milik daerah</b>			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100%			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Asset			1 unit	1 unit	100%			
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>Persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan</b>			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100%	<b>100 %</b>		

<b>Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48 Laporan</b>							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan yang dibayarkan setiap bulannya selama satu tahun			12 bulan	12 bulan	100%			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan					12 Laporan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang di bayarkan setiap bulan nya selama satu tahun			87 Orang	87 Orang	100%			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan					12 Laporan		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pesentase sarana dan prasarana pemeliharaan barang miliki daerah</b>			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100%			
	<b>Jumlah Pemeliharaan</b>	<b>24 Unit</b>							

	<b>Barang Milik Daerah</b>								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang dipelihara			15 unit	15 unit	100%			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit					14 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang dipelihara			15 unit	15 unit	100%			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit					6 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana Gedung kantor yang dipelihara			5 Paket	5 Paket	100%			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	5 Unit					5 Unit		

	Dipelihara/Direhabilitasi								
<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik</b>	<b>300 Orang</b>		<b>500.000 Orang</b>	<b>500.000 Orang</b>	<b>100%</b>	<b>150000 Orang</b>		
	<b>Persentase layanan berbasis elektronik</b>						<b>100%</b>		
	<b>Persentase perpustakaan yang dikembangkan</b>	<b>100%</b>							
<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah perpustakaan yang dibina</b>	<b>100 Perpustakaan</b>					<b>150 Perpustakaan</b>		
	<b>Persentase pemanfaatan perpustakaan berbasis multimedia</b>						100%		
	<b>Persentase perpustakaan yang sesuai standar Nasional Perpustakaan</b>	<b>100%</b>							
	<b>Persentase pemanfaatan layanan wahana</b>	<b>100%</b>					100%		

	<b>Pusat Peraga IPTEK Daerah</b>								
	Jumlah peningkatan Tenaga perpustakaan dan pustakawan								
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	20 Perpustakaan							
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibina			100 Perpustakaan sekolah	100 Perpustakaan sekolah	100%			
	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	80 Perpustakaan							

	Jumlah peningkatan tenaga perpustakaan dan Pustakawan			1000 orang	1000 orang	100%			
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	100 Orang							
	Jumlah pengunjung layanan perpustakaan			150000 Orang	150000 Orang	100%			
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	3 Layanan							
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi dalam pengembangan bahan pustaka			100 Eksemplar	100 Eksemplar	100%			

	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200 Eksemplar							
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengunjung Perpustakaan			150.000 Orang	150.000 Orang	100%			
	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan							
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Pustakawan dan Jumlah Profil Perpustakaan			100 Informasi	100 Informasi	100%			
	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi						10 Dokumen		

<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Pembudayaan Gemar Membaca</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus						20 Lokus		
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah pengembangan literasi berbasis inklusi sosial			100 Eksemplar	100 Eksemplar	100%			
	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	1 Perpustakaan							
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Keempatnya						20 Orang		
<b>PROGRAM PELESTARIAN</b>	<b>Persentase Naskah Kuno yang di Lestarikan</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100%	<b>100 %</b>		

<b>KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>										
<b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Koleksi Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam</b>	<b>30 Karya</b>			<b>400 Eksemplar</b>	<b>400 Eksemplar</b>	100%			
Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah judul pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam				400 Eksemplar	400 Eksemplar	100%			
	Jumlah koleksi KCKR yang dihimpun									
Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	10 Penerbit						100 Eksemplar		
<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Pelestarian Naskah Kuno</b>	<b>50 Naskah</b>								

	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	50 Eksemplar							
	<b>Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah</b>	<b>Jumlah penerbit katalog induk daerah dan bobliografi</b>			<b>200 Eksamplar</b>	<b>200 Eksamplar</b>	100%			
	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumla dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan						200 entri		
	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah entri penerbit bibliografi daerah			100 Eksamplar	100 Eksamplar	100%			
	<b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah pengembangan kolesksi budaya etnis nusantara</b>			<b>200 Eksamplar</b>	<b>200 Eksamplar</b>	100%			

Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah buku pengadaan koleksi budaya			100 exp	100 exp	100%			
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Persentase Perangkat daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan arsip secara baku</b>	<b>100 %</b>							
	<b>Persentase Pengelolaan Kearsipan Secara Baku Berbasis Teknologi Informatika</b>	<b>100 %</b>							
<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>	<b>Persentase pengelolaan arsip dinamis</b>	<b>100%</b>							
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Lkd Yang diawasi			10 LKD	10 LKD	100%			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	51 Laporan							

	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase pengelolaan arsip statis</b>	<b>100%</b>							
Akuisisi Arsip Statis		Jumlah Arsip			100 Register	100 Register	100%			
		Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	37 Arsip							
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		<b>Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>12 Lembaga</b>							
		<b>Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang mengelola arsip secara baku berbasis IT</b>	<b>35 Perangkat Daerah</b>							
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		Jumlah pengunjung layanan dan peserta sosialisasi			100 Orang	100 Orang	100%			
		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	300 Pengguna							

Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga	Jumlah khasanah arsip, pemberdayaan SDM dan lembaga kearsipan			10 unit	10 unit	100%			
Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	10 Laporan							

Berdasarkan data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tabel T-C. 29 dapat diketahui bahwa dalam rangka pencapaian rencana target yang ditetapkan Rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dilaksanakan program/kegiatan sebanyak 4 Program, 15 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, dengan realisasi keuangan mencapai 98,98% dengan realisasi fisik sebesar 100% - Evaluasi terhadap kinerja keuangan dalam tahun anggaran 2022 aspek dukungan dana yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 56.223.690.005,- (Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Rupiah) yang terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 52.787.947.005,- (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Rupiah) dan belanja Modal sebesar Rp 3.435.743.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2023 seluruh program/kegiatan telah dapat

dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu terdiri dari 4 Program, 15 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dimana dari 4 Program yang terdapat di Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan atau realisasi sebesar 100 %.

## **II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan, pada Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh.

Dinamika lingkungan strategis yang berlangsung sangat cepat merupakan faktor penentu keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Faktor perubahan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi dinamika pembangunan, sehingga diperlukan respon positif dan antisipatif untuk melakukan penyesuaian diberbagai sektor pembangunan terutama dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan meliputi :

- a. Perluasan gedung atau ruang layanan perpustakaan umum dan renovasi Depot Arsip yang representative, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemustaka dan pengguna arsip setiap tahunnya;
- b. Layanan perpustakaan ibu dan anak, yang seringkali mendapat kunjungan dari berbagai sektor maupun lintas sektor dan menjadi percontohan (studi banding) bagi Provinsi lain dalam menerapkan perpustakaan ini di daerahnya;
- c. Pendampingan dan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang diberikan ke tiap – tiap OPD maupun perpustakaan sekolah dan sejenisnya baik di Kabupaten maupun Kota se Sulsel;
- d. Perpustakaan multimedia yang merupakan wahana pembelajaran dan bermain bagi pelajar maupun pengajar yang membutuhkan.
- e. Meningkatnya perpustakaan lorong yang diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat Sulawesi Selatan;
- f. Kegiatan Road Show yang dilakukan diberbagai daerah Kab./Kota se Sulsel, sehingga menumbuhkan gemar membaca bagi masyarakat;

- g. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknik kearsipan maupun perpustakaan di tingkat OPD Provinsi, Kota maupun Kabupaten.

Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- 2) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah;
- 3) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Kinerja pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2023 yang didasarkan pada indikator Kinerja keberhasilan (IKK) sebagai Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sulawesi Selatan perubahan Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan seperti tabel dibawah ini : Terlampir Tabel T-C. 30

**Tabel T-C. 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

NO	Indikator	SPM/ Nilai Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PADA PERANGKAT DAERAH)				Realisasi Capaian	
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai		33,86	65	71	82,51	67,62	68,20
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks		74,9	78	81	82,51	74,77	86,74

### **II.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman

apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan adalah "**Belum optimalnya kualitas pelayanan Publik**", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa realisasi Jumlah Pengunjung dan Jumlah Buku belum optimal dari seluruh potensi yang ada. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

Rendahnya minat pada masyarakat/pelajar;

Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku

Permasalahan ini dapat diidentifikasi pada urusan perpustakaan dengan melihat bahwa :

Minimnya ketersediaan koleksi buku bacaan pada perpustakaan digital di aplikasi;

Jumlah bahan pustaka yang masih kurang;

Jumlah perpustakaan desa yang belum merata;

Kurang maksimalnya kegiatan hunting buku-buku lokal yang ada di kabupaten/kota untuk di kelompokkan menjadi buku exellen sebagai tambahan koleksi di layanan;

Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM perpustakaan untuk peningkatan layanan.

Sedangkan urusan kearsipan Hal ini dapat teridentifikasi dari :

Minimnya penambahan informasi sumber khasanah arsip;

Minimnya sarana dan prasarana untuk peningkatan digitalisasi arsip statis kedalam aplikasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);

Minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan dengan beban kerja yang ada.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pencapaian Visi dan Misi Gubernur yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan terhadap capaian program nasional / internasional, salah satunya adalah Pencapaian SDGs.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia secara resmi untuk 15 tahun kedepan (berlaku sejak 2016 sampai dengan 2030), guna mengakhiri kemiskinan mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Sebagai konsekuensinya, maka pemerintah daerah di

seluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan diimplementasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Pemerintahan. Dalam hal ini meningkatnya kualitas layanan dalam Rasio perpustakaan persatuan penduduk dengan target setiap tahunnya 0,03 persen. Ini dimaksudkan untuk peningkatan minat baca masyarakat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai lokasi.

SDGs dari indikator yang mendukung tentang buta aksara yaitu:

Persentase angka melek aksara penduduk umur  $\geq 15$  tahun, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu di bentuknya layanan perpustakaan ibu dan anak yang berkedudukan di jl. Lanto dg pasewang yang di lengkapi dengan alat praga berupa cerita dongeng, pengenalan huruf, storytelling dan permainan anak-anak usia dini.

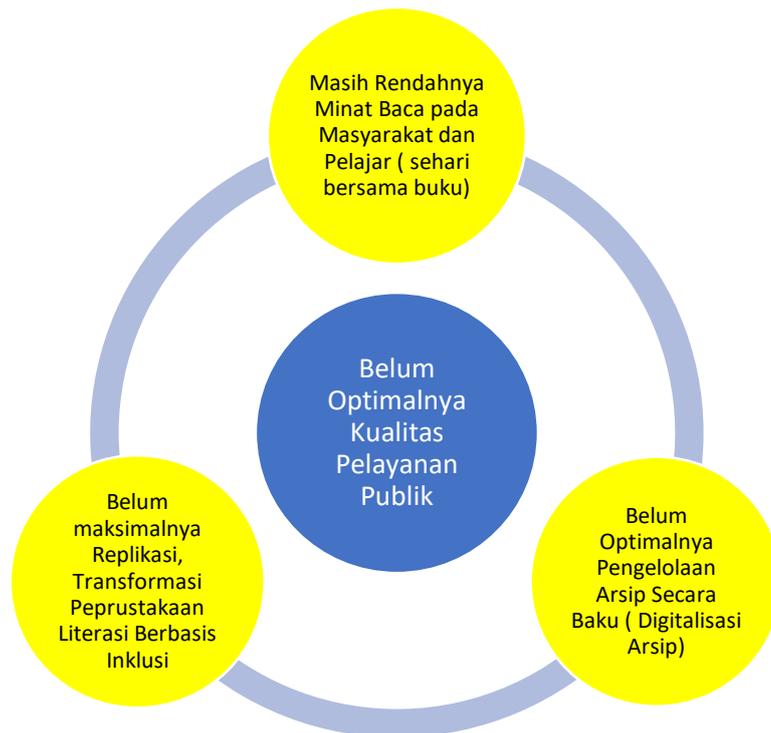
Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan menyediakan layanan berupa perpustakaan layanan umum, perpustakaan sekolah dan refleksi perpustakaan lorong.

Permasalahan utama dan permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3.1.**

***Kerangka Permasalahan Pelayanan***

***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan***



Keberhasilan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan sistem yang ada sangat tergantung pada peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan jumlah pengunjung. Kesadaran masyarakat yang tinggi tentang pentingnya perpustakaan dan kearsipan merupakan faktor terpenting. Hal ini membawa misi dan

konsekuensi perubahan sikap dan kesadaran warga masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan dan kearsipan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan” dengan prioritas nasional, yaitu : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk meperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia dengan kegiatan prioritas, yaitu :

Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;

Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk meperkuat bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter dengan kegiatan prioritas, yaitu :

Peningktan budaya literasi;

Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah periode 2024-2026 yang telah disusun,

dan dalam proses transisi diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Pada dasarnya yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan sudah merupakan kebutuhan dan merupakan skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal itu tentu dalam upaya mengakomodir rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sulawesi Selatan guna mendukung fungsi Kearsipan dan Perpustakaan. Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sulawesi Selatan tertuang dalam Terlampir Tabel T-C. 31.

**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	80 Nilai	35,933,4 52,480.0 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	80 Nilai	32,041, 443,477	
			Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	100 Nilai	0.00			Nilai Rata- Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	100 Nilai		

				<b>Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b>	<b>0.00</b>			<b>Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b>			
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja yang Tersedia Tepat Waktu</b>	<b>12/10 Laporan / Dokumen</b>	<b>370,000,000.00</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja yang Tersedia Tepat Waktu</b>	<b>10 Dokumen/ 12 Laporan</b>	<b>544,715,800</b>	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	250,000,000.00		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	223,967,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	10,000,000	

										n Dokumen RKA-SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000.00		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2,500,000.00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	10,000,000.00	

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	100,000,000.00		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	270,748,800	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>	<b>15/27 Laporan / Dokumen</b>	<b>28,367,084,361.00</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>	<b>27 Dokumen/ 15 Laporan</b>	<b>26,411,341,694</b>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang / Bulan	28,322,084,361.00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang / Bulan	26,270,841,694	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10,000,000.00		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	40,500,000	

		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5,000,000.00		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	100,000,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000.00							
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	5,000,000.00							

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10,000,000.00							
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14 Dokumen	10,000,000.00							
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>6/2 Laporan / Dokumen</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>2 Dokumen/6 Laporan</b>	<b>6,734,000</b>	

		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500,000.00		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6,734,000	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	500,000.00							
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1,000,000.00							
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	500,000.00							

		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500,000.00						
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>210,000,000.00</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>13,630,000</b>
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	2,500,000.00		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	13,630,000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket	2,500,000.00						

		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	100,000,000.00							
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	2,500,000.00							
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	2,500,000.00							
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	50,000,000.00							

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50,000,000.00							
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1,384,379,031.00</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>884,450,431</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	62,000,000.00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	478,779,031.00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	760,580,431	

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	50,000,000.00		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	49,470,000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	73,600,000.00		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	74,400,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	700,000,000.00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	15,000,000.00		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		

		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5,000,000.00						
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>10,000,000.00</b>						
		Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	10,000,000.00						
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48 Laporan</b>	<b>4,810,789,088.00</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48 Laporan</b>	<b>3,685,850,152</b>

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000.00							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,068,000.00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,647,576,325	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,500,000.00							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,737,789,088.00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,038,273,827	

		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>24 Unit</b>	<b>778,200,000.00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>24 Unit</b>	<b>494,721,400</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	241,200,000.00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	152,428,050	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	72,000,000.00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	6 Unit	157,810,450	

		atau Lapangan						atau Lapangan		Perizinannya			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	345,000,000.00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	184,482,900	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	120,000,000.00							

				<b>Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik</b>	<b>300 Orang</b>	<b>2,400,000,000.00</b>			<b>Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik</b>	<b>300 Orang</b>	<b>##### ##### ##</b>		
				<b>Persentase perpustakaan yang dikembangkan</b>	<b>100 %</b>	<b>0.00</b>			<b>Persentase perpustakaan yang dikembangkan</b>	<b>100%</b>			
			<b>Makassar</b>	<b>Jumlah perpustakaan yang dibina</b>	<b>100 Perpustakaan</b>	<b>2,000,000,000.00</b>			<b>Jumlah perpustakaan yang dibina</b>	<b>100 Perpustakaan</b>	<b>##### ##### ##</b>		
		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase perpustakaan yang sesuai standar Nasional Perpustakaan</b>	<b>100 %</b>	<b>0.00</b>		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase perpustakaan yang sesuai standar Nasional Perpustakaan</b>	<b>100%</b>	<b>##### ##### ##</b>	

			Makassar	Persentase pemanfaatan layanan wahana Pusat Peraga IPTEK Daerah	100 %	0.00			Persentase pemanfaatan layanan wahana Pusat Peraga IPTEK Daerah	100%		
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Makassar	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	20 Perpustakaan	450,000,000.00		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Makassar	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	20 Perpustakaan	451,053,600
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh	Makassar	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam	80 Perpustakaan	400,000,000.00		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh	Makassar	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina	80 Perpustakaan	500,000,000

		Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			
								Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Makassar	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	100 Orang	100,000,000	
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat	Makassar	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan	3 Layanan	800,000,000.00		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat	Makassar	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3 Layanan	250,000,000	

		Daerah Provinsi		Melalui Peningkatan Koleksi				Daerah Provinsi		yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi			
								Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Makassar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200 Eksemplar	200,000,000	
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Makassar	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	350,000,000.00		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Makassar	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	300,000,000	

		<b>Pembudaya an Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Mak assa r</b>	<b>Persentase Pembudayaan Gemar Membaca</b>	<b>100 %</b>	<b>400,000, 000.00</b>		<b>Pembudaya an Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Mak assa r</b>	<b>Persentase Pembuday aan Gemar Membaca</b>	<b>100 %</b>	<b>##### ##### ##</b>	
		Pembangun an dan Pemeliharaa an Sarana Perpustakaa n di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenanga n Daerah Provinsi	Mak assa r	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	10 Perpu stakaa n	200,000, 000.00							
		Pemberian Penghargaa n Gerakan Budaya Gemar Membaca	Mak assa r	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	6 Orang	100,000, 000.00							
		Pengemban gan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Mak assa r	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah	10 Perpu stakaa n	100,000, 000.00		Pengemban gan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Mak assa r	Jumlah Layanan Perpustaka an Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah	1 Perpu stakaa n	1,500,0 00,000	

				Provinsi yang Dikembangkan					Provinsi yang Dikembangkan				
		<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>		<b>Persentase Naskah Kuno yang di Lestarikan</b>	<b>100 %</b>	<b>600,000,000.00</b>		<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>		<b>Persentase Naskah Kuno yang di Lestarikan</b>	<b>100 %</b>	<b>600,000,000</b>	
		<b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</b>	Makassar	<b>Jumlah Koleksi Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam</b>	<b>30 Karya</b>	<b>200,000,000.00</b>		<b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</b>	Makassar	<b>Jumlah Koleksi Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam</b>	<b>30 Karya</b>	<b>400,000,000</b>	
		Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak	Makassar	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	10 Penerbit	200,000,000.00		Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak	Makassar	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan	10 Penerbit	400,000,000	

		dan Karya Rekam						dan Karya Rekam		Karya Cetak dan Karya Rekam			
		<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Pelestarian Naskah Kuno</b>	<b>50 naskah</b>	<b>200,000,000.00</b>		<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Pelestarian Naskah Kuno</b>	<b>50 Naskah</b>	<b>200,000,000</b>	
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Makassar	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	50 Eksemplar	200,000,000.00		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Makassar	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	50 Eksemplar	200,000,000	

		<b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara</b>	<b>100 Eksemplar</b>	<b>200,000,000.00</b>						
		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Makassar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	100 Eksemplar	200,000,000.00						
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase Perangkat daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan arsip secara baku</b>	<b>100 %</b>	<b>1,500,000,000.00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Persentase Perangkat daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan arsip</b>	<b>100 %</b>	<b>452,312,400</b>		

									secara baku			
			Makassar	Persentase Pengelolaan Kearsipan Secara Baku Berbasis Teknologi Informatika	100 %	0.00			Persentase Pengelolaan Kearsipan Secara Baku Berbasis Teknologi Informatika	100 %		
		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Makassar	Persentase pengelolaan arsip dinamis	100 %	600,000,000.00		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Makassar	Persentase pengelolaan arsip dinamis	100%	200,000,000
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	51 Laporan	350,000,000.00		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	51 Laporan	200,000,000
		Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis	Makassar	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	400 Arsip	150,000,000.00						

		dan Autentikasi										
		Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Makassar	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	600 Arsip	100,000,000.00						
		<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase pengelolaan arsip statis</b>	<b>100 %</b>	<b>350,000,000.00</b>		<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase pengelolaan arsip statis</b>	<b>100%</b>	<b>2,323,000</b>
		Akuisisi Arsip Statis	Makassar	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	37 Arsip	350,000,000.00		Akuisisi Arsip Statis	Makassar	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	37 Arsip	2,323,000
		<b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>12 Lembaga</b>	<b>550,000,000.00</b>		<b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>12 Lembaga</b>	<b>249,989,400</b>

			<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang mengelola arsip secara baku berbasis IT</b>	<b>35 Perangkat Daerah</b>	<b>0.00</b>			<b>Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang mengelola arsip secara baku berbasis IT</b>	<b>35 Perangkat Daerah</b>		
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Makassar	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	12 Pengguna	350,000,000.00		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Makassar	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	300 Pengguna	149,989,400
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	35 Laporan	200,000,000.00		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan	10 Laporan	100,000,000

										Daerah Provinsi			
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase Dokumen Arsip Daerah yang Diamankan dan Dilestarikan</b>	<b>100 %</b>	<b>1,300,000,000.00</b>							
		<b>Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase Volume Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>100 %</b>	<b>300,000,000.00</b>							
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki	Makassar	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di	3.000 Arsip	150,000,000.00							

		Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Makassar	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	600 Berkas	150,000,000.00							
		<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>200,000,000.00</b>							
		Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Makassar	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	2.000 Arsip	100,000,000.00							

		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Makassar	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	2.000 Arsip	100,000,000.00							
		<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang Digabung dan/atau Dibubarkan</b>	<b>100 %</b>	<b>300,000,000.00</b>							
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat	Makassar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan	9 Daftar	100,000,000.00							

		Daerah Provinsi		Perangkat Daerah Provinsi									
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Makassar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	2.500 Arsip	100,000,000.00							
		Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	2.500 Arsip	100,000,000.00							

		<b>Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Alih Media yang Dikelola</b>	<b>100 %</b>	<b>200,000,000.00</b>							
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Makassar	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	50 Arsip	100,000,000.00							
		Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Makassar	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2.500 Arsip	100,000,000.00							

		<b>Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase Pencarian Arsip Statis</b>	<b>100 %</b>	<b>300,000,000.00</b>							
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Makassar	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	50 Arsip	100,000,000.00							
		Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Makassar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	50 Arsip	100,000,000.00							
		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Makassar	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	10 Arsip	100,000,000.00							

	<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>		<b>Persentase Pelayanan Kearsipan bagi Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat (Lembaga/Instansi)</b>	100 %	200,000,000.00							
	<b>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase Layanan Izin Penggunaan Arsip</b>	100 %	200,000,000.00							
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Makassar	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2.500 Arsip	100,000,000.00							

		Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan	Makassar	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan dan/atau dikecualikan	2 SOP	100,000,000.00							
--	--	--	----------	---	-------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

## **2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Propinsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait. Terlampir T-C. 32

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah</b>	<b>80 Nilai</b>	
			<b>Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah</b>	<b>100 Nilai</b>	
			<b>Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b>	
	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja yang Tersedia Tepat Waktu</b>	<b>10 Dokumen/12 Laporan</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>	<b>27 Dokumen/ 15 Laporan</b>	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>2 Dokumen/ 6 Laporan</b>	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48 Laporan</b>	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>24 Unit</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>					
	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik</b>	<b>300 Orang</b>	
			<b>Persentase perpustakaan yang dikembangkan</b>	<b>100%</b>	
	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah perpustakaan yang dibina</b>	<b>100 Perpustakaan</b>	
			<b>Persentase perpustakaan yang sesuai standar Nasional Perpustakaan</b>	<b>100%</b>	
			<b>Persentase pemanfaatan layanan wahana Pusat Peraga IPTEK Daerah</b>	<b>100%</b>	
	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase Pembudayaan Gemar Membaca</b>	<b>100 %</b>	
	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>		<b>Persentase Naskah Kuno yang di Lestarkan</b>	<b>100 %</b>	

	<b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Koleksi Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam</b>	<b>30 Karya</b>	
	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Jumlah Pelestarian Naskah Kuno</b>	<b>50 Naskah</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>		<b>Persentase Perangkat daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan arsip secara baku</b>	<b>100 %</b>	
			<b>Persentase Pengelolaan Kearsipan Secara Baku Berbasis Teknologi Informatika</b>	<b>100 %</b>	
	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase pengelolaan arsip dinamis</b>	<b>100%</b>	
	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>	<b>Makassar</b>	<b>Persentase pengelolaan arsip statis</b>	<b>100%</b>	
	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b>	Makassar	<b>Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>12 Lembaga</b>	
			<b>Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang mengelola arsip secara baku berbasis IT</b>	<b>35 Perangkat Daerah</b>	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Keberhasilan pencapaian sebuah tujuan membutuhkan sinergi termasuk sinergi program pengembangan perpustakaan dan kearsipan antara Pusat/Nasional dan Daerah. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat berperan penting dalam mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, kerukunan dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, Penelitian, pelestarian,informal dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa (Pasal 2 dan 3). Sementara itu, pembangunan perpustakaan bertujuan

memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 4).

Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia : ”  
***Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi***”.

Misi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Perpustakaan Nasional dalam memberikan pelayanan prima pemberian akses informasi;
2. Menyediakan dan memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai regulasi.

Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang kearsipan turut berperan aktif dan mendukung terwujudnya agenda pembangunan yaitu menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis dengan fokus pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Visi Arsip Nasional Republik Indonesia : ” ***Menjadikan arsip sebagai sumber informasi publik yang autentik dan terpercaya.***”

Visi ini mengandung maksud bahwa arsip merupakan bukti dari dinamika perkembangan perjalanan Bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai

kegagalan yang dialami Bangsa ini mulai dari Sabang sampai Maraoke. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya dan harkat serta terwujudnya wawasan kebangsaan yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5(lima) Tahun meliputi sebagai berikut :

1. Menjadikan arsip dinamis sebagai sumber informasi yang Akuntabel;
2. Menjadikan arsip statis sebagai sumber informasi bernilai historis;
3. Menyediakan dan memberikan layanan informasi publik secara cepat dan tepat;
4. Melaksanakan layanan informasi publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Visi Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2023 yaitu **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**

Adapun Misi yaitu:

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.

2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

#### Program Unggulan

1. Sukses penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024 berlangsung secara luber, jurdil, lancar, aman dan damai;
2. Pengendalian Inflasi;
3. Penangan Stunting dan Gizi buruk;
4. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem;
5. Ketahanan dan Kedaulatan Pangan;
6. Kemudahan pelayanan publik dan investasi;
7. Sinergi Program prioritas nasional dan daerah;
8. Stabilitas keamanan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk sebagai Mandat ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Bab Empat Pasal 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan disebutkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membuat perumusan dan Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan. Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan Kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan Pelaporan urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;

- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024–2026, yaitu :

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Sulsel mempunyai tujuan pembangunan di Bidang Perpustakaan dan kearsipan yang ingin dicapai ialah

1. Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;

Sasaran dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan dalam kurun waktu 2024–2026 oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Sulsel, sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan Daerah;
2. Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik;

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPK Prov.**  
**Sulsel**

N O	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR	SAT UAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNYA		
						20 24	20 25	20 26
1	Pemerintah Yang Berorientasi Melayani, Inovatif dan Berkarakter	Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkannya akuntabilitas kinerja pemerintahan Daerah	1.Nilai Sakip OPD	Nilai	81	82	83
2	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter		Optimalnya Kualitas pelayanan Publik	1.Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	81	82, 51	84, 53
				2.Nilai Kegemaran Membaca	Nilai	71	74, 67	79, 69
				3. Nilai pengawasan kearsipan	Nilai	80	81	82

**Tabel 3.2.1**  
**Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama DPK Prov**  
**SulSel**

Misi : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Tujuan : Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi Pengukuran	Satuan
Optimalnya kualitas pelayanan publik	IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat)	Bidang Perpustakaan dan UPT Layanan Perpustakaan	7 Komponen unsur Pembangunan literasi Masyarakat dibagi aspek Masyarakat perjenis perpustakaan	Indeks
	TGM (Tingkat /Nilai Kegemaran Membaca)		5 Dimensi nilai TGM sampling dan target responden	Nilai
	Nilai Pengawasan Kearsipan	Bidang Kearsipan dan UPT Layanan Kearsipan	Nilai pengawasan kearsipan eksternal dan internal	Nilai

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **IV. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:

##### 1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan.

##### 2) Pencapaian SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang di sepakati oleh para pemimpin dunia secara resmi untuk 15 tahun kedepan (berlaku sejak 2016 sampai dengan 2030), guna mengakhiri kemiskinan mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan diimplementasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Pemerintahan. Dalam hal ini meningkatnya kualitas layanan dalam Rasio perpustakaan persatuan penduduk dengan target setiap tahunnya 0,03 persen. Ini dimaksudkan untuk peningkatan minat baca masyarakat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai lokasi.

SDGs dari indikator yang mendukung tentang buta aksara yaitu:

1. Persentase angka melek aksara penduduk umur  $\geq 15$  tahun, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu di bentuknya layanan perpustakaan ibu dan anak yang berkedudukan di jl. Lanto dg pasewang yang di lengkapi dengan alat praga berupa cerita dongeng, pengenalan huruf, storytelling dan permainan anak-anak usia dini.
2. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan menyediakan layanan berupa perpustakaan layanan umum, perpustakaan sekolah dan refleksi perpustakaan lorong.
- 3) Pemberantasan Kemiskinan  
Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan

Provinsi/Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan daerah terisolir yaitu

1. Mengembangkan pembangunan replikasi perpustakaan lorong dan perpustakaan desa
2. Hibah bahan bacaan ke desa dan komunitas penggiat literasi
3. Perpustakaan pelayanan keliling
- 4) Pencapaian NSPK dan SPM

Perpustakaan menyediakan layanan koleksi buku dan koleksi judul buku yang diminati masyarakat dan SDM fungsional pustakawan untuk melayani pengunjung

Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

- a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan. Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah 6 Program dengan 21 Kegiatan dan 73 Sub kegiatan yang mengacu pada permendagri 90 tahun 2019 dan Kemendagri no 050\_5889 tahun 2021.

- b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Sulawesi Selatan dan melingkupi semua Desa/Kelurahan.
- c. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan. Yaitu dengan jumlah pagu Rp. 36.159.180.391 ( Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) tahun Anggaran 2024

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan dan Sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Dalam ini rumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan yang tidak diatur dalam pemendagri no. 90 tahun 2019 dan kemendagri 050\_5889 Tahun 2021 sudah di usulkan untuk penambahan kegiatan/program pada BAPELITBANDA Provinsi Sulawesi Selatan Terlampir pada tabel T.C 33

**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

KODE	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (output)/ sub kegiatan ( output )	Perubahan Rencana Tahun 2024 ( Tahun Rencana)				Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuha n Dana Pagu	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>									
01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah</b>		<b>80 Nilai</b>	<b>34,374,974,080</b>	<b>APB D Provinsi</b>		<b>85 Nilai</b>	<b>42,349,741,568.00</b>
		<b>Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah</b>		<b>100 Nilai</b>				<b>100 Nilai</b>	

		<b>Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti</b>		<b>100 %</b>				<b>100 %</b>		
01	1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja yang Tersedia Tepat Waktu</b>		<b>10 Dokumen/12 Laporan</b>	<b>495,805,100</b>	<b>APB D Provinsi</b>		<b>12/10 Laporan / Dokumen</b>	<b>430,000,000.00</b>
01	1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	6 Dokumen	225,135,500	APB D Provinsi		6 Dokumen	250,000,000.00
01	1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	22,896,000	APB D Provinsi		1 Dokumen	5,000,000.00

01	1.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	22,896,000	APB D Provinsi	1 Dokumen	5,000,000.00
01	1.	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	25,182,900	APB D Provinsi	1 Dokumen	7,500,000.00
01	1.	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	28,470,500	APB D Provinsi	1 Dokumen	7,500,000.00
01	1.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Dinas perpustakaan dan	6 Laporan	17,771,000	APB D	6 Laporan	5,000,000.00

			Ikhtisar Realisasi	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan			Provisi		
			Kinerja SKPD							
01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	6 Laporan	153,453,200	APB D Provisi	6 Laporan	150,000,000.00
01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>		<b>27 Dokumen/ 15 Laporan</b>	<b>28,946,679,297</b>	<b>APB D Provisi</b>	<b>15/27 Laporan / Dokumen</b>	<b>29,790,084,361.00</b>
01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	Dinas perpustakaan	180 Orang/ Bulan	28,724,227,497	APB D	180 Orang/ Bulan	29,770,084,361.00

			Gaji dan Tunjangan ASN	dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan			Provinsi			
01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Dokumen	101,433,600	APB D Provinsi	12 Dokumen	10,000,000.00
01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Dokumen	121,018,200	APB D Provinsi	12 Dokumen	10,000,000.00
01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>		<b>2 Dokumen / 6 Laporan</b>	<b>6,734,000</b>	APB D Provinsi	<b>6/2 Laporan / Dokumen</b>	<b>1,500,000.00</b>
01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Rencana Kebutuhan	Dinas perpustakaan dan	1 Dokumen	6,734,000	APB D	1 Dokumen	1,500,000.00

			Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD	Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan			Provisi			
01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		100 %	12,720,000	<b>APB D Provisi</b>		100 %	<b>20,000,000.00</b>
01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	5 Unit	12,720,000	APB D Provisi		5 Unit	20,000,000.00
01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		100 %	1,494,703,548	APB D Provisi		100 %	<b>1,482,379,031.00</b>
01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi	7 Paket	50,006,100	APB D Provisi		7 Paket	75,000,000.00

			Sulawesi Selatan							
01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	20 Paket	977,435,248	APB D Provinsi	20 Paket	478,779,031.00
01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	35,000,000	APB D Provinsi	10 Paket	60,000,000.00
01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	60,052,000	APB D Provinsi	12 Laporan	73,600,000.00

01	1.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	351,890,200	APB D Provinsi	12 Laporan	750,000,000.00
01	1.	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	5 Dokumen	20,320,000	APB D Provinsi	5 Dokumen	45,000,000.00
01	1.	08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>48 Laporan</b>	<b>3,136,213,135</b>	APB D Provinsi	<b>48 Laporan</b>	<b>4,805,789,088.00</b>
01	1.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi	12 Laporan	1,100,005,428	APB D Provinsi	12 Laporan	1,068,000,000.00

			yang Disediakan	Sulawesi Selatan						
01	1.084		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	2,036,207,707	APB D Provinsi	12 Laporan	3,737,789,088.00
01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>		<b>24 Unit</b>	<b>282,119,000</b>	APB D Provinsi	<b>24 Unit</b>	<b>1,014,200,000.00</b>
01	1.091		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	14 Unit	117,885,000	APB D Provinsi	6 Unit	241,200,000.00

01	1.	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	6 Unit	48,134,000	APB D Provinsi	8 Unit	108,000,000.00
01	1.	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	5 Unit	116,100,000	APB D Provinsi	5 Unit	665,000,000.00
02				<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik</b>		<b>300 Orang</b>	<b>2,193,956,100</b>	<b>APB D Provinsi</b>	<b>400 Orang</b>	<b>2,350,000,000.00</b>
					<b>Persentase perpustakaan yang dikembangkan</b>		<b>100%</b>			<b>100 %</b>	
02	1.	01		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah perpustakaan yang dibina</b>		<b>100 Perpustakaan</b>	<b>1,993,956,100</b>	APB D Provinsi	<b>112 Perpustakaan</b>	<b>2,200,000,000.00</b>

02	1.01			<b>Persentase perpustakaan yang sesuai standar Nasional Perpustakaan</b>		<b>100%</b>		APB D Provinsi		<b>100 %</b>	
02	1.01			<b>Persentase pemanfaatan layanan wahana Pusat Peraga IPTEK Daerah</b>		<b>100%</b>		APB D Provinsi		<b>100 %</b>	
02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	20 Perpustakaan	99,956,000	<b>APB D Provinsi</b>	<b>100 %</b>	22 Perpustakaan	500,000,000.00
02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	80 Perpustakaan	203,044,000	APB D Provinsi		90 Perpustakaan	500,000,000.00

			dengan Standar Nasional Perpustakaan	Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan						
02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	100 Orang	200,000,000	APB D Provinsi	100 Orang	100,000,000.00
02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	3 Layanan	964,905,900	APB D Provinsi	3 Layanan	600,000,000.00
02	1.01	09		Jumlah Bahan Perpustakaan	Dinas perpustakaan			APB		

			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	kaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	200 Eksemplar	354,000,000	D Provinsi		200 Eksemplar	200,000,000.00
02	1.01	15	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	3 Perpustakaan	172,050,200			3 Perpustakaan	300,000,000.00
02	1.01		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Pembudayaan Gemar Membaca</b>		100 %	200,000,000	<b>APB D Provinsi</b>		100 %	150,000,000.00
02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah	Dinas perpustakaan dan Kearsipan	10 Perpustakaan	200,000,000	APB D Provinsi		14 Perpustakaan	150,000,000.00

				Provinsi yang Dikembangkan	Provinsi Sulawesi Selatan						
03	1.02		<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>Persentase Naskah Kuno yang di Lestarikan</b>		<b>100 %</b>	<b>342,999,900</b>	APB D Provinsi		<b>100 %</b>	<b>400,000,000.00</b>
03	1.01		<b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Koleksi Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam</b>	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	<b>30 Karya</b>	<b>199,999,900</b>	APB D Provinsi		<b>30 Karya</b>	<b>200,000,000.00</b>
03	1.01	02	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	10 Penerbit	199,999,900	<b>APB D Provinsi</b>		10 Penerbit	200,000,000.00

03	1.03		<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Pelestarian Naskah Kuno</b>		<b>50 Naskah</b>	<b>143,000,000</b>	APB D Provinsi		<b>50 naskah</b>	<b>200,000,000.00</b>
03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	50 Eksemplar	143,000,000	APB D Provinsi		50 Eksemplar	200,000,000.00
02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Persentase Perangkat daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kot a yang menyelenggarakan arsip secara baku</b>		<b>100 %</b>	<b>400,000,000</b>	APB D Provinsi		<b>100 %</b>	<b>1,450,000,000.00</b>
				<b>Persentase Pengelolaan Kearsipan Secara Baku Berbasis</b>		<b>100 %</b>			<b>100 %</b>		

				<b>Teknologi Informatika</b>							
02	1.01		<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>	<b>Persentase pengelolaan arsip dinamis</b>		<b>100%</b>	<b>100,000,000</b>			<b>100 %</b>	<b>350,000,000.00</b>
02	1.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	51 Laporan	100,000,000			59 Laporan	350,000,000.00
02	1.02		<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase pengelolaan arsip statis</b>		<b>100%</b>	<b>100,000,000</b>	<b>APB D Provinsi</b>		<b>100 %</b>	<b>400,000,000.00</b>
02	1.02	05	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	37 Arsip	100,000,000			37 Arsip	400,000,000.00
02	1.03		<b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan</b>	<b>Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/</b>		<b>12 Lembaga</b>	<b>200,000,000</b>	APB D Provinsi		<b>18 Lembaga</b>	<b>700,000,000</b>

			<b>Nasional Tingkat Provinsi</b>	<b>Kabupaten/Kot a yang ditingkatkan kapasitasnya</b>							
02	1. 04			<b>Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang mengelola arsip secara baku berbasis IT</b>		<b>35 Perangk at Daerah</b>		APB D Provi nsi		<b>40 Perangk at Daerah</b>	
.0 2	1. 03	.0 1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Dinas perpusta kaan dan Kearsipa n Provinsi Sulawesi Selatan	300 Pengg una	100,000,0 00	APB D Provi nsi		18 Pengg una	400,000,000.0 0
02	1. 03	0 2	Pemberdayaan Kapabilitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapabilitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Dinas perpusta kaan dan Kearsipa n Provinsi Sulawesi Selatan	10 Laporan	100,000,0 00	APB D Provi nsi		40 Laporan	300,000,000.0 0

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel Tahun 2024-2026 dan mengacu pada evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel yang memuat kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

Renja DPK Prov. Sulsel Tahun 2024 memuat 6 program, dan 21 kegiatan serta 73 Sub Kegiatan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi renja DPK Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan skala ketersediaan waktu (*urgensitas*) dan skala tingkat kepentingan (*krusialitas*) terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun sesuai Renstra Tahun 2024-2026. Rencana kerja ini mengindikasikan upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan dengan senantiasa menekankan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini diharapkan dapat mewujudkan kebijakan peningkatan kinerja OPD, peningkatan kualitas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai satuan kerja yang mandiri berbasis pada misi (*mission-driven organization*) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ini merupakan penjabaran Tahun Pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Dalam pelaksanaan manajemen kinerja, Renja ini akan menjadi salah satu acuan dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi Tahun 2022 dan tahun 2023 sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

## **V.2 Rekomendasi**

Renja DPK Provinsi Sulsel Tahun 2024 memuat 6 program, 21 kegiatan dan 72 sub kegiatan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Adapun yang menjadi catatan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan adalah:

- Meningkatkan koordinasi horisontal, vertikal dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu;
- Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala;
- Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang terjadwal;
- Meningkatkan koordinasi internal dalam penyusunan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan dalam hal pembagian anggaran kas;
- Perlunya dilakukan estimasi dan analisa yang tepat dalam

penyelesaian anggaran kas, sehingga dapat mendongkrak realisasi anggaran;

- Perlunya kecermatan dalam menelaah usulan dan kesiapan lokasi pekerjaan.

Makassar, Juli 2023  
Kepala Dinas



**Ir.H.ANDI PARENRENGI,MP**  
NIP. 19631231 199703 1 020